

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewan Kabupaten Garut didirikan pada tahun 1925 sebagai lembaga pemerintahan setempat yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Pembentukan dewan tersebut juga diikuti dengan perubahan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat Garut, terutama kaum pribumi. Di masa itu, kaum pribumi Garut mengalami perubahan sosial-politik yang signifikan akibat berbagai faktor, termasuk pengaruh politik Belanda, perjuangan nasionalisme, dan juga faktor internal dari masyarakat Garut sendiri.¹

Pada masa Kerajaan Pajajaran wilayah Garut dikenal dengan nama Galih Pakuan, yang pada masa pemerintah Islam berubah nama menjadi Limbangan dan terakhir pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda berubah menjadi Garut. Berdasarkan *Staatsblad* No.. 60 tahun 1913 daerah Garut resmi menjadi bagian dari kabupaten-kabupaten Priangan dengan ibukota Garut.²

Luas wilayah Garut adalah 3.065 km², yang dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yaitu 3 kontrolir, 9 distrik, dan 29 onderdistrik. Secara geomorfologis, bentang alam Kabupaten Garut bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan dibagian selatan terdiri dari dataran rendah dan hamparan pesisir pantai.³ Wilayah Garut secara umum beriklim tropis basah yang cocok untuk pertanian. Sejak abad ke-19 jumlah penduduk Garut terdiri dari 510.000 jiwa, yang terbagi dari penduduk pribumi, Eropa dan Timur Jauh. Corak perekonomian penduduk Garut hidup dari pertanian, baik sebagai pemilik tanah maupun buruh tani. Tanaman padi adalah komoditas utama daerah tersebut, sedangkan untuk penduduk di

¹ A. Wibowo, "Dinamika Sosial Politik Masyarakat Pribumi di Kabupaten Garut Pada Masa Pemerintahan Belanda," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah* vol. 1, No. 1 (2017): 1-9.

² Maman Darmansyah, *Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa 1915-1929*, Vol. 3 No. 02, *Jurnal Renaissance*, 2018, hlm. 375

³ Nanang SaptoNo., *Pemerintahan, Kekuasaan, dan Tatakota Pemikiran Kajian pada Kabupaten Garut*, Balai Arkeologi Jawa Barat: Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Masyarakat Masa Lampau, Hlm. 106

wilayah lereng pegunungan biasanya mengusahakan tanahnya untuk tanaman palawija dan tanaman ekspor, seperti singkong, kacang tanah, kentang, cabai jagung, kopi, dan teh.⁴

Sistem birokrasi ketika Garut masih menjadi nama Limbangan, dipimpin seorang kepala Nagari, seorang yang menjadi pemimpin adat yang merupakan sebagai keturunan Bangsawan, Prabu dan Sunan dan memiliki wilayah serta masyarakat Limbangan. Pada masa Mataram Islam pemimpin pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah adalah Bupati. Pada tahun 1871 dikeluarkanlah *Preanger Reorganisatie* yang membagi wilayah Priangan menjadi sembilan afdeling diantaranya adalah afdeling Limbangan yang beribu kota di Garut. Namun ketika reorganisasi ini, mengakibatkan kekuasaan Bupati sebagai pemimpin pemerintah mengalami kemerosotan. Bupati tidak memiliki tugas berarti. Sebagai pengganti hak-hak bupati yang dicabut, para bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Meski demikian bupati tetap memiliki kharisma pribadi dan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Tahun 1903 keluar Undang-Undang *Desentralisasi* yang bertujuan untuk menghapus sisa-sisa dari masyarakat tradisional menuju administrasi modern, kemudian menciptakan bagian-bagian teritorial yang bersifat Otonom. Sebagai realisasi dari program Otonomi ini, Pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1905 membentuk *Gemeente* (kotamadya) sebagai daerah Otonom, daerah yang dapat mengatur diri sendiri. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk kesatuan administrasi pemerintahan provinsi sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1925 Nomor 285. Pulau Jawa dibagi ke dalam tiga provinsi. Provinsi yang pertama kali dibentuk adalah *Provincie West-Java* pada tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1925 Nomor 378 tertanggal 14 Agustus 1925. Kemudian menyusul dibentuk *Provincie Oost-Java* pada tahun 1928 dan *Provincie Midden-Java* pada tahun 1929. Pemerintahan provinsi terdiri atas Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*),

⁴ Ibid, 379

⁵ Op. cit, hlm. 117

Badan Pemerintahan Harian (*College van Gedeputeerden*), dan Gubernur. Dewan Provinsi merupakan badan perwakilan yang terdiri atas orang-orang Belanda, Pribumi, dan Timur Asing. Di *Provincie West-Java* anggotanya sebanyak 45 orang (20 Belanda, 20 Pribumi, dan lima Timur Asing), di *Provincie Midden-Java* 51 anggota (23 Belanda, 23 Pribumi, dan lima Timur Asing), dan di *Provincie Oost-Java* 65 anggota (30 Belanda, 30 Pribumi, dan enam Timur Asing). Beberapa anggota dipilih oleh anggota-anggota dari dewan-dewan setempat yang berada dalam provinsi, yaitu dewan-dewan kabupaten dan kotapraja. Anggota-anggotanya diangkat oleh Gubernur Jenderal setelah mendengar *Raad van Indié* dan sebelumnya diberikan rekomendasi oleh gubernur. Dewan Provinsi memilih anggota Badan Pemerintahan Harian yang terdiri atas dua sampai enam orang yang bertanggung jawab kepada Dewan Provinsi dan menerima gaji bulanan dengan persetujuan Gubernur Jenderal. Badan Pemerintahan Harian bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari provinsi. Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Ia adalah perangkat provinsi akan tetapi juga wakil dari pemerintah pusat. Karena jabatannya, gubernur adalah ketua, tetapi bukan anggota dari Dewan Provinsi dan Badan Pemerintahan Harian. *Provincie West-Java* dibentuk dengan beribu kota di *Batavia* (Jakarta). Wilayahnya meliputi sembilan *residentie* (keresidenan) yang mencakup enam belas *regentschap* (kabupaten) dan enam *stadsgementen* (kotamadya). Kesembilan keresidenan itu yaitu, Keresidenan Bantam (Banten), Keresidenan *Batavia*, Keresidenan *Buitenzorg* (Bogor), Keresidenan Krawan, Keresidenan West-Priangan, Keresidenan Midden-Priangan, Keresidenan Oost-Prianganter, Keresidenan Cirebon, Keresidenan Indramayu.⁶

Namun secara signifikan, perubahan pemerintahan kabupaten Garut terjadi mulai tahun 1925. Perubahan itu sebagai akibat dari "*decentralisatie*" yang diterapkan oleh pemerintah kolonial melalui *bestuurshervormingwet* (Undang-undang pembaharuan pemerintahan) pada tahun 1922. Melalui

⁶ Ani Ismarini, *Op.Cit*, hlm. 189

aturan itu, pemerintah kolonial membagi pemerintahan di daerah menjadi dewa-dewan lokal.⁷

Dalam sejarahnya Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (Otonom). Pada tahun 1915, RAA. Wiratanudatar sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh keponakannya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929). Wewenang yang bersifat Otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Selama periode 1930-1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).⁸

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena saat ini masih terdapat sedikit penelitian yang mengeksplorasi masalah ini dengan cara yang lebih mendalam. Padahal, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial-politik kaum pribumi pasca pembentukan Dewan Kabupaten Garut dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam memahami sejarah dan perkembangan Kabupaten Garut. Penulis akan mengkaji dinamika sosial-politik kaum pribumi pasca pembentukan Dewan Kabupaten Garut dengan menggunakan beberapa referensi dan sumber yang relevan. Sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen arsip yang terkait dengan topik penelitian. Penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis data dan menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan penjelasan di atas, tulisan ini akan memfokuskan pada dinamika sosial-politik kaum pribumi dalam Dewan Kabupaten Garut, dengan memperhitungkan berbagai latar belakang yang terjadi selama pembentukan Dewan Kabupaten Garut serta dampaknya pada aspek sosial dan ekonomi kaum pribumi.

⁷ Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1925. Tweede Gedeelte. Kalender en Personalie. Weltevreden: Landsrukkerij. hal 221-222.

⁸<https://www.garutkab.go.id/page/sejarah-singkat>, Diakses 17 Desember 2022

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah dinamika sosial-politik kaum pribumi setelah pembentukan Dewan Kabupaten Garut pada periode 1925-1942. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memfokuskan pembahasan pada topik tersebut agar penelitian tidak melebar dan dapat menghindari ketidakkonsistenan dengan tujuan awal pembuatan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti meliputi hal-hal berikut :

1. Bagaimana dinamika sosial-politik kaum pribumi setelah pembentukan dewan kabupaten Garut pada tahun 1925-1942?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika sosial-politik kaum pribumi pasca pembentukan dewan kabupaten Garut 1925-1942?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi pasca pembentukan dewan kabupaten Garut bagi kehidupan kaum pribumi 1925-1942?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah hasil dari penelitian penulis atas dasar-dasar yang mana sebelumnya telah penulis fokuskan dalam perumusan masalah, dan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dinamika sosial-politik kaum pribumi di Garut pasca pembentukan Dewan Kabupaten pada periode 1925-1942. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan sosial-politik yang terjadi pada masyarakat pribumi Garut pada masa lalu, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, terutama di bidang sejarah dan sosiologi, serta memberikan masukan bagi kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam mengatasi permasalahan sosial-politik di Garut pada masa kini.

2. Khusus

- a. Untuk Menjelaskan perubahan sosial-politik yang terjadi pada masyarakat pribumi Garut setelah pembentukan Dewan Kabupaten Garut pada tahun 1925 - 1942.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial-politik kaum pribumi di Garut pada tahun 1925-1942, termasuk faktor internal dan eksternal.
- c. Untuk Mengidentifikasi dampak dinamika sosial-politik tersebut terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat pribumi Garut pada tahun 1925-1942.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul "Dinamika Sosial Politik Kaum Pribumi dalam *Regentschapsraad* Garut 1925-1942" memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman tentang sejarah sosial politik Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang sejarah sosial politik Indonesia, khususnya dalam konteks Garut pada periode 1925-1942. Dengan mempelajari dinamika sosial politik kaum pribumi dalam *Regentschapsraad* Garut, kita dapat memahami bagaimana para pemimpin pribumi pada masa itu berjuang untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka.
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang Otonomi daerah di Indonesia pada masa kolonial. *Regentschapsraad* Garut adalah lembaga Otonom daerah yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda, sehingga mempelajari dinamika sosial politik dalam lembaga ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Otonomi daerah berfungsi pada masa itu.
3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mempelajari dinamika sosial politik di daerah lain di Indonesia pada masa kolonial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi

bagi penelitian-penelitian yang ingin mempelajari dinamika politik dalam lembaga Otonom daerah di Indonesia pada masa sekarang.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penulisan sejarah, tentu harus ada beberapa pustaka yang dilibatkan guna menjadi dorongan dan acuan bagi penulis. Penulis memiliki acuan kepada beberapa jurnal dan juga arsip sebagai bagian dari sebuah penulisan sejarah supaya memiliki tulisan yang aktual dan sempurna.

Pertama Jurnal *Historia Soekapoera* vol.6, No..1. 2019, dengan judul “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tasikmalaya Dari Masa ke Masa*”, jurnal ini membahas mengenai benih demokrasi di Timur Priangan, yang kemudian membahas tentang lahirnya *Regentchapraad* tahun 1925 serta mengawali pemerintahan demokrasi di Tasikmalaya, dan membahas juga bagaimana teknis dalam pemilihan anggota Dewan Kabupaten Tasikmalaya.

Jurnal ini sangat membantu peneliti dalam mengungkap sejarah mengenai Kota Garut secara khusus yang berkenaan dengan pendudukan Tentara Jepang yang menurut dalam penelitian dapat dikatakan tidak ada. Tulisan-tulisan mengenai Kota Garut sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 1945 secara umum banyak berkenaan dengan sejarah Kota Garut pada masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Kolonial Belanda keadaan Kota Garut sangat nyaman untuk ditempati. Pada masa itu, Kota Garut dikenal dengan julukan “*Swiss van Java*” dan kemudian karena keindahannya dijuluki juga dengan nama “*mooi Garut*” (Garut yang permai). Orang Garut atau orang Priangan pada umumnya menyebut kota Garut dengan istilah “*Garut Pangirutan*” (Garut Pemikat).

Kedua Jurnal *Renaissance* Vol. 3, No.. 2, Agustus 2018, dengan judul “*Garut Era Kepemimpinan Bupati R.A.A Soera Kertalegawa 1915-1929*”, membahas Garut pada masa kepemimpinan R.A.A Soera Kertalegawa pada tahun 1915-1929 yang dimana Garut mengalami berbagai gejolak kesulitan yang di alami khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Isi jurnal ini dipandang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, terutama ketika

membahas tentang latar belakang berdirinya Kabupaten Garut, kondisi sosial budaya, politik dan keadaan masyarakat pribumi di Garut.

Ketiga, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 16 No. 1 Maret 2014, dengan judul "Garut Pada Masa Pemerintahan Penduduk Jepang (1942-1945)", tentang pendudukan Tentara Jepang di Kota Garut, penulis juga menggunakan bantuan dari ilmu sosial lainnya, terutama ilmu politik, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan pendudukan Jepang di Kota Garut, salah satunya dilatarbelakangi oleh ambisi pemerintah Kekaisaran Jepang, terutama untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Dapat diketahui bahwa meskipun Pemerintahan Pendudukan Jepang berlangsung selama tiga setengah tahun, namun masyarakat Garut sangat menderita lahir dan batin karena pada masa itu Pemerintahan Pendudukan Jepang sangat kejam dan menguras sumber daya alam, serta sumber daya manusianya. Isi penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena berkaitan langsung kondisi sosial masyarakat garut di tahun 1942-1945.

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, selain mengacu pada sumber-sumber tertentu, juga digunakan berbagai arsip dari tempat penyimpanan arsip yang terpercaya, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan beberapa media penyimpanan arsip lainnya (P. Setiawan, 2018; S. Sofwan, 2019 ; E. Ardiyanto, 2017). Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini serta memberikan kerangka acuan yang lebih luas dan mendalam. Referensi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut juga dijadikan dasar untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh dari penelitian ini.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian sejarah diperlukan analisa sejarah yang menyediakan sebuah kerangka pemikiran yang merangkum suatu konsep serta teori. Adanya konsep serta teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang peneliti bahas memerlukan beberapa pendekatan untuk mendapatkan

analisis yang baik. Untuk itu tesis menggunakan *Teori Struktural-Fungsional* sebagai kerangka teoritis yang membantu dalam menganalisis data.

Teori Struktural-Fungsional digunakan untuk menganalisis Dinamika Sosial Politik Kaum Pribumi Dalam *Regentschapsraad* Garut 1925-1942. Teori ini menekankan pentingnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh struktur sosial dalam menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, struktur sosial yang dimaksud dapat merujuk pada struktur kelembagaan politik yang ada di Garut pada masa itu, seperti *Regentsschapsraad* Garut.

Teori Struktural-Fungsional dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian ini, terutama pada bagian pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial-politik kaum pribumi pasca pembentukan dewan kabupaten Garut 1925-1942. Teori ini dapat membantu menjelaskan fungsi-fungsi dari kelembagaan politik tersebut dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Garut pada masa itu. Sebagai contoh, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan politik di Garut pada tahun 1925-1942 yang dapat mempengaruhi dinamika sosial-politik kaum pribumi. Dalam hal ini, *Regentsschapsraad* Garut dapat dipandang sebagai struktur sosial yang memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Garut. Namun, di sisi lain, kelembagaan politik tersebut juga dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Dengan menggunakan teori tersebut sebagai kerangka berfikir, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang sosial-politik kaum pribumi di Kabupaten Garut pada masa pemerintahan Belanda, serta memperoleh perspektif yang lebih kaya untuk menganalisis data dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dimana *Teori Struktural-Fungsional*, dengan fokus pada interaksi antara bagian-bagian sistem sosial, dapat membantu dalam memahami bagaimana struktur sosial di Kabupaten Garut pada masa itu mempengaruhi sosial-politik kaum pribumi.

G. Metodologi Penelitian

Seorang sejarawan biasanya tidak akan melakukan sesuatu penelitian benar-benar berangkat dari-No.1⁹, Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri.¹⁰ juga memaparkan dan mendefinisikan bahwa metode sejarah adalah seperangkat asa dan aturan yang sistematis yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan secara sintesis hasil-hasil yang dicapainya yang pada umumnya berbentuk tertulis.¹¹

Maka penulis melakukan sebuah penulisan dengan melakukan beberapa metode yang telah disepakati oleh seluruh sejarawan yakni metode Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Daliman dalam bukunya *Metode Penelitian Sejarah* ia memaparkan empat prosedur metode penelitian sejarah :

Tahapan *Heuristik*, heuristik merupakan proses mencari data serta mengumpulkan sumber-sumber ataupun data yang diperlukan, literatur ilmiah, buku, koran, majalah, jurnal, skripsi, tesis maupun metode internet yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat. Dengan demikian yang sudah dijalankan dan didapatkan oleh penulis diantaranya ialah beberapa sumber sejarah dan sebagiannya sumber-sumber primer, sekunder dan bahkan visual. Sumber-sumber tersebut adalah beberapa sumber data yang dihasilkan dari berbagai tempat penyimpanan arsip diantaranya Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa naskah narasumber "*Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*"¹², naskah narasumber tersebut berisikan beberapa surat-surat keputusan Gubernur, surat keputusan tentang pemilihan anggota dewan local, dan

⁹ Syamsudin, Helius. 2007 "*Metodologi Sejarah*", (Yogyakarta: Ombak), hlm. 72.

¹⁰ Ratna, Nyoman Kutha. 2010. "*Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*". (Pustaka Pelajar : Yogyakarta), hlm 41.

¹¹ Gilbert J. Garragan, S.J. "*Metode Penelitian Sejarah*" dalam (Daliman, 2012), hlm. 27

¹² "*Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*", Arsip Nasional Republik Indonesia 1998.

beberapa surat keputusan lainnya yang bersangkutan dengan Otonomi daerah di Hindia Belanda

Berkas mengenai "*Jubileum Verslag Regentchapsraad Garoet 1926-1936*"¹³, berkas ini merupakan laporan ulang tahun kabupaten Garut dari tahun 1926-1936 yang dimana melaporkan beberapa laporan mengenai devisi administrasi yang ada di kabupaten Garut, pembentukan staf Dewan kabupaten Garut pada tahun 1935, pemasukan dan pengeluaran anggaran dana kabupaten garut, beberapa surat pernyataan anggota DPRD kabupaten Garut yang diangkat dan terpilih periode 1935-1936 atau periode ketiga, dan ada juga s pernyataan anggota dewan kabupaten Garut yang terpilih.

Berkas mengenai "*Province Djeung Kaboepaten*"¹⁴, berkas yang berisikan Berkas mengenai "Garoet"¹⁵, berkas yang berisikan tentang beberapa ikan soal pariwisata dan tempat penginapan di Garoet, dan bagaimana Garutmenjadikan ikonik alam yang indah.

Setelah tahapan heuristik selesai maka tahapan selanjutnya dipilah kembali mana yang termasuk kedalam sumber primer dan juga sekunder. Sehingga sumber dalam sejarah bisa dibagi menjadi dua:

- a. Sumber Primer, yakni sumber yang berasal dari tangan pertama atau dari pelaku sejarah atau saksi dari peristiwa sejarah.
- b. Sumber Sekunder, yakni sumber yang sudah dianalisis (diolah) oleh orang setelahnya.¹⁶

Dalam proses ini maka peneliti membagi sumber-sumber data dengan dua cara, diantara dengan menggunakan literatur pustaka buku yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional.

Setelah semua data tersebut ditemukan, penulis mencoba mengumpulkan dalam dua kategori, yaitu sumber primer (sumber utama atau

¹³ Universiteits bibliotheek Leiden, "*Jubileum Verslag regentschapsraad Garoet 1926-1936*", No.. 1807.

¹⁴ Druk N. V. Ms. Vorkink, Universiteit Leiden, "*Province Djeung Kaboepaten*", Bandoeng 1925, No..896.

¹⁵ G. Kolf dan Co, "*Garoet*", Batavia weltevreden 1992.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm 95-98.

sejaman) dan juga sumber sekunder (sumber yang berkaitan dengan pembahasan), adapun sumber yang didapatkan sebagai berikut:

Sumber Primer

Dokumen Koran-Koran

1. Batavia No. 102, 04 Juni 1934.
2. Batavia No. 12, 13 Desember 1930.
3. Batavia No. 122, 30 Mei 1930.
4. Batavia No. 123, 31 Mei 1927.
5. Batavia No. 130, 13 April 1927.
6. Batavia No. 174, 07 Februari 1925.
7. Batavia No. 184, 08 September 1932.
8. Batavia No. 197, 24 November 1931.
9. Batavia No. 220) Dari Garut 09-21-1932
10. Batavia No. 227, 10 November 1939.
11. Batavia No. 275, 28 November 1930.
12. Batavia No. 288, 10-26-1925.
13. Batavia No. 312, 15 Oktober 1925.
14. Batavia No. 335, 07 November 1925.
15. Batavia No. 352, 11-26-1927.
16. Batavia No. 62, 17 Maret 1930.
17. Batavia No. 82, 10 Maret 1934.
18. Batavia No. 83, 10 April 1930.
19. Batavia No. 90, 20 Maret 1934.
20. Batavia, 15 Desember 1933.
21. Batavia, 06 Agustus 1926.
22. Batavia, 11 Mei 1928.
23. Batavia, 20 Desember 1938.
24. Batavia, 25 Januari 1926.
25. Batavia, No. 134, 06 September 1926.
26. Batavia, No. 29, 05 Januari 1923.
27. Breda No. 27, 02 Januari 1934.
28. Breda, 26 Mater 1934.

29. De Expres, Semarang No. 189, 17 Agustus 1939.
30. De Expres, Semarang No. 291 19 Desember 1922.
31. De Expres, Semarang No. 99, 28 April 1936.
32. De Expres, Surat Sumatra Medan No. 99, 05 Februari 1941.
33. De Koerier, Bandung No. 165, 19 Oktober 1935.
34. De Koerier, Bandung No. 213, 12 Desember 1931.
35. De Koerier, Bandung No. 215, 15 Desember 1930.
36. De Koerir, Bandung No. 39, 18 Mei 1932.
37. De Koerirr, Bandung No. 27, 04 Mei 1936.
38. Deli Courant, Madan No. 160, 11 Juli 1924.
39. Deli Courant, Medan No. 290, 20 Desember 1938.
40. Den Haag No. 17493, 30 Desember 1933.
41. Den Haag, No. 17493, 30 Desember 1933.
42. Kabar India, Soerabaia No. 240, 03 Juli 1925.
43. Lokomotif, Samarang No. 290, 17 Desember 1930.
44. Lokomitf, Samarang No. 192, 24 Agustus 1927.
45. Lokomotif, 11 Mei 1926.
46. Lokomotif, Samarang No. 189, 16 Agustus 1939.
47. Lokomotif, Samarang No. 194) Masalah Anggaran 22 Agustus 1932
48. Lokomotif, Samarang No. 215, 21 September 1931.
49. Lokomotif, Samarang No. 24, 29 Januari 1932.
50. Lokomotif, Samarang No. 271, 25 November 1925.
51. Lokomotif, Samarang No. 86, 16 April 1928.
52. No. 129, 06 Juli 1933.
53. Pos Sore, 03 Februari 1935.
54. Pos Sore, Den Haag No. 16335, 05 Juli 1936.
55. Pos Sore, Den Haag No. 17517, 28 Januari 1934.
56. Pos Sore, 15 Agustus 1930
57. Semarang, No. 74, 14 Juli 1925.
58. Soerabaia No. 102, 14 Januari 1933
59. Soerabaia No. 89, 19 April 1932.
60. Soerabaia, No. 66, 12 Juni 1926.

61. Soerabaja No. 295, 22 Desember 1933.
62. Soerabaja No. 77, 13 Desember 1933
63. Soerabaja No. 88, 17 April 1930
64. Soerabaja, No. 186, 29 April 1926.
65. Soerabaja, No. 213, 06 Februari 1926.
66. Surat Kabar India, Soerabaia No. 8, 24 September 1928.
67. Surat Kabar India, 10 Juli 1930.
68. Surat Kabar India, 22 Februari 1930.
69. Surat Kabar India, Soerabaia No. 6, 21 September 1928.
70. Surat Kabar India, Soerabaja No. 226, 15 Juni 1928.
71. Surat Kabar India, Soerabaja No. 72 12 September 1922.
72. Surat Sumatra, 12 Januari 1993.
73. Surat Sumatra, Medan No. 272, 23 November 1931
74. Surat Sumatra, Medan No. 291, 15 Desember 1930.
75. Surat Sumatra, Medan No. 95, 26 April 1932.
76. Telegraf, Amsterdam No. 15171, 11-24 November 1932.
77. Utusan Prianger, Bandung No. 14, 15 Maret 1923.
78. Utusan Sumatra, Padang No. 158, 11 Juli 1924.

Laporan

1. 1928 (Peta Yang Menunjukkan Pembagian Administratif Baru Jawa Dan Madura 1928
2. 1929 (Babad Pasundan Jeung Ringkesan Babad Hindia 1929
3. 1929 (Laporan Akhir Otonomi Di Desa Jawa Dan Madura 1929
4. 1929 (Laporan Desentralisasi 1929)
5. 1930 (Gambaran Ringkas Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Politik Utama Yang Aktif Dikalangan Pribumi Di Hindia Belanda 1930
6. 1930 (Sensus Hindia Belanda 1930)
7. 1930-1931 (Daftar Abjad Divisi Administratif (Administratif) Dan Hukum Adat Hindia Belanda
8. 1930-1932 (Nama Anggota 1930-1932)
9. 1931 (Geografi Hindia Belanda Untuk LO Disamping Peta 1931
10. 1931 (Dari Provinsi. Gedung DPRD Garut 12 Desember 1931

11. 1931 Kabupaten 03-25-1931
12. 1931 (Peta Yang Menunjukkan Pembagian Administratif Baru Jawa Dan Madura 1931

Sumber Sekunder

BUKU

1. Zeggen, 1940, "*Vieb Oud-60u Verneurs Generaal U*" Uitg. Vereniging voor Nationale Veiligheid, Koningskade 1 7, 's-Gravenhage.
2. Lekkerkerker.(1930) "*Nieuwe Administratieve Indeeling Van Java En Madoera Met Toelichting*". Nederlandsche Java-Institut. 2e Verbeterde Druk. J.H.De Bussy Amsterdam, A°.
3. Beknopt Nopens De Overzicht Voornaamste Politieke Werkzaam Verenigingen Onder De In Inheemsche Bevolking Nederlandsch-Indië (1930)
4. Dr. W. J. A. Schouten. 1934 "*Indrukken Nederlandsch-Indië, In 1934, Voor Rekening Der J.P.Coen Van Een Reis Naar Vereeniging*".

Kritik

Langkah selanjutnya adalah kritik, yang meliputi penentuan kebenaran sumber-sumber yang telah diperoleh, setelah sumber-sumber sejarah dalam berbagai kategori telah dikumpulkan.¹⁷

a. Kritik Intern

Kritik intern adalah pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan kritik untuk menyeleksi data menjadi sebuah fakta. Kritik intern juga untuk mengidentifikasi keabsahan tentang keshahihan sumber atau disebut dengan kredibiitas sumber dari segi isi konten. Adapun tahapan untuk melakukan kritik intern sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tulisan atau aksara yang ada dalam sumber
- 2) Memahami maksud dari penulis sumber tentang pikiran si penulis sumber
- 3) Membaca dan menganalisis isi konten dalam sumber apakah logis atau tidak logis

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm. 105

- 4) Membanding isi konten dalam satu sumber dengan sumber lain yang memiliki kesamaan
- 5) Setelah membandingkan maka identifikasi isi konten yang lebih kredibilitasnya tinggi dan logis dengan sebuah peristiwa sejarah
- 6) Jika isi konten memakai bahasa zamannya maka lakukan suntingan dan terjemahkan.

Proses pengujian terhadap setiap sumber yang didapat, apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak merupakan sebuah tahapan dalam kritik intern. Dalam tahapan ini, sumber tertulis kemudian dibandingkan dari segi isi sumber tertulis tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tema pembahasan. Ini berlaku untuk sumber-sumber tertulis, baik berupa dokumen maupun sumber tertulis lainnya. Kritik intern ditentukan dan diklarifikasi melalui kritik internal, dan sumber yang dapat diperoleh dikritik. Sumber primer seperti dari dokumen dan sumber sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

b. Kritik Ekstern

Dalam penelitian kritik ekstern sejarah langkah awal, harus diperiksa, apakah sumber yang telah dikumpulkan itu merupakan sumber otentik atau bukan. Untuk mengetahui dan menentukan otentisitas sumber bisa membuat pertanyaan terhadap sumber yang ditemukan yaitu dengan pertanyaan, (1) apakah sumber itu merupakan sumber dikehendaki/layak atau tidak? (2) apakah sumber itu asli atau turunan, dan (3) apakah sumber itu utuh atau sudah berubah?

Kritik ekstern digunakan untuk menyelesaikan tentang kredibilitas data atau kebenaran sebuah fakta sejarah. Penulis menelusuri dari kajian pustaka salah satunya sumber koran-koran local maupun sumber kolonial, setelah dianalisis buku-buku maupun dokumen yang tersedia dari segi kelayakan dan juga isi dirasa baik dan juga memenuhi kriteria sebagai sumber.

Mengetahi sumber itu layak atau tidak bisa menganalisis tanggal dokumen ditulis dikeluarkan dengan menggunakan metode *Terminus No.n ante queem* (titik tidak sebelumnya), dan *Terminus No.n post anti queem* (titik tidak sesudahnya). Selanjutnya mengidentifikasi bahan dokumen kertas ata

tinta, naskah lama biasanya ditulis dalam lontar, daun nifah, kulit kayu. Jenis tinta yang dipergunakan harus dianalisis secara kimiawi karena tinta adalah produk yang mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Mengidentifikasi tulisan tangan, tanda tangan, materai, jenis huruf ataupun watermark.

Kritik yang dilakukan sumber sejarah, diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik ekstern adalah kritik yang digunakan untuk memperoleh keabsahan tentang keaslian sebuah sumber sedangkan kritik intern adalah kritik yang digunakan untuk menganalisis mengenai pembuktian kebenaran sebuah fakta mengenai sejarah. penulis menggunakan kritik keduanya untuk mengkritik sumber data arsip yang kemudian diolah menjadi sumber yang akurat. Hal ini diperlukan karena untuk membantu dalam menyusun penulisan secara sistematis sehingga dapat membantu penulis dalam memberikan paparan dan interpretasi pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan penulisan atau historiografi.

Kritik ekstern terhadap sumber lisan dengan melakukan penilaian berupa apakah ia sebagai pelaku atau saksi, apakah ia secara fisik sehat jasmani atau tidak, dan apakah ia masih kuat ingatannya atau memang sudah pikun. Jadi secara ringkas tahapan kritik ekstern itu sebagai berikut:

- 1) Kapan sumber itu dibuat ?
- 2) Dimana sumber itu dibuat ?
- 3) Siapa yang membuat ?
- 4) Dari bahan apa sumber itu dibuat ?
- 5) Apakah sumber itu dalam bentuk asli ?

Semua dokumen dan buku diatas kondisinya sangat baik dan juga bisa dibaca sehingga memudahkan bagi peneliti untuk melihat tulisannya secara jelas, apalagi tinta yang digunakan juga masih tergolong bagus, sehingga peneliti tidak kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan pada isi buku.

Interpretasi

Dalam tahapan ini kegiatan mentafsirkan fakta-fakta serta menerapkan makna yang saling kolerasi atau berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Dengan kata lain sumber informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang

dikritik dapat terkontruksi dengan baik. Pada tahapan ini penulis merangkaikan data yang telah diselesaikan menjadi keseluruhan yang harmoni dan logis, suatu data yang dibiarkan berdiri sendiri atau sejumlah fakta yang bersangkutan secara kronologis merupakan sebuah kisah sejarah. Setelah mendapatkan dan mengkritik sumber seperti yang telah dipaparkan diatas, penulis merangkainya untuk mengkisahkan peristiwa-peristiwa dan kajian yang akan dilakukan untuk melengkapi tulisan (historiografi) yang akan dipaparkan. Dengan begitu penulis mampu untuk menuliskan secara komunikatif, sehingga sangat mudah untuk dibaca.

Interpretasi historis ini¹⁸ meliputi:

a. *Interpretasi Verbal*

Interpretasi ini berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu bahasa, perbendaharaan kata (vocabulary), tata bahasa, konteks, dan terjemahan.

b. *Interpretasi Teknis*

Interpretasi teknis dokumen didasarkan pada dua faktor: pertama, tujuan pembuatan dokumen, dan kedua, bentuk penulisan yang tepat. Yaitu dimaksudkan tujuan disini adalah bahwa si penulis dokumen bukan semata-mata bertujuan menyampaikan informasi, mungkin saja ada tujuan lainnya.

c. *Interpretasi Logis*

Interpretasi logis adalah penafsiran yang didasarkan pada cara berpikir yang logis, yang berarti didasarkan pada cara berpikir yang benar. Jadi dalam menafsirkan sebuah dokumen itu secara keseluruhan berisi sebuah gagasan yang logis.

d. *Interpretasi Psikologis*

Interpretasi psikologis adalah Interpretasi suatu dokumen, yaitu upaya untuk membacanya dari sudut pandang si pembuat dokumen untuk mempelajari sudut pandangnya. Interpretasi ini berkaitan dengan kehidupan spiritual film dokumenter, yang mencakup dua aspek, umum dan individu. Umum mengacu pada cara berpikir yang berlaku bagi semua

¹⁸ Gilbert Garraghan, *A Guide to Historical Method*. (New York: Fordham University Press, 1957), hlm 321-330.

orang, sedangkan individu mengacu pada cara berpikir tertentu dari film dokumenter, yang mempengaruhi tulisannya dan tampak pada karya-karya yang diciptakannya.

e. *Interpretasi Faktual*

Interpretasi semacam ini tidak didasarkan pada kata-kata tetapi pada fakta. Dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah membiarkan fakta berbicara sendiri, tanpa perlu membuat interpretasi macam-macam, sehingga interpretasi faktual.

Dalam menginterpretasikan setiap data yang diperoleh diperlukan pendalaman pemahaman terhadap objek yang diteliti. Begitu pula yang peneliti lakukan saat ini. Objek kajian yang peneliti kaji ini mengenai “*Dinamika Sosial Politik Kaum Pribumi Dalam Regentschapsraad Garut (1925-1942)*”. Peneliti memberikan batasan waktu sejak tahun 1925 pasca Perang Dunia 1 dan mulai munculnya peristiwa terbentuknya dewan kabupaten garut, sampai tahun 1942 yang merupakan masa akhir dari konflik sosial politik di Garut menjelang kemerdekaan indonesia.

Historiografi

Historiografi merupakan langkah selanjutnya setelah melalui beberapa tahapan dalam metode sejarah. Menulis dan menyajikan temuan penelitian sejarah dikenal sebagai historiografi.¹⁹ Akibatnya, langkah terakhir dalam penulisan ini adalah mengkritisi bukti-bukti yang ada dan kemudian merekonstruksinya menjadi teks sejarah.

Tahapan historiografi ini, penulis akan menjelaskan sebuah karya ilmiah dibuat dengan sistematis dan konsisten. Ini diperlukan bagi peneliti dan diperlukan pembahasan secara sistematis dan kronologis untuk itu perlunya pengelompokan dalam beberapa bab. Semua ini diperlukan untuk memudahkan pemahaman bagi sang pembaca. Pembahasan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan.

¹⁹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm. 111

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk memperoleh pemahaman dan penelaahan terhadap skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun dimana bab satu dengan bab yang lain saling terkait dan merupakan suatu kesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk satu kesatuan yang utuh.

Bab pertama merupakan **BAB I PENDAHULUAN**, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* merupakan **BAB II DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DEWAN KABUPATEN GARUT**, yang membahas bagaimana dinamika sosial-politik kaum pribumi setelah pembentukan Dewan Kabupaten Garut 1925 - 1942.

Bab *ketiga* merupakan **BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA SOSIAL POLITIK**, yang membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika sosial-politik kaum pribumi pasca pembentukan Dewan Kabupaten Garut 1925-1942.

Bab *empat* merupakan **BAB IV DAMPAK PASCA PEMBENTUKAN DEWAN KABUPATEN GARUT**, yang membahas dampak sosial ekonomi pasca pembentukan Dewan kabupaten Garut bagi kehidupan kaum pribumi 1925-1942

Bab *lima* merupakan **BAB V**, merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan, disertai dengan lampiran